

# **BAB I**

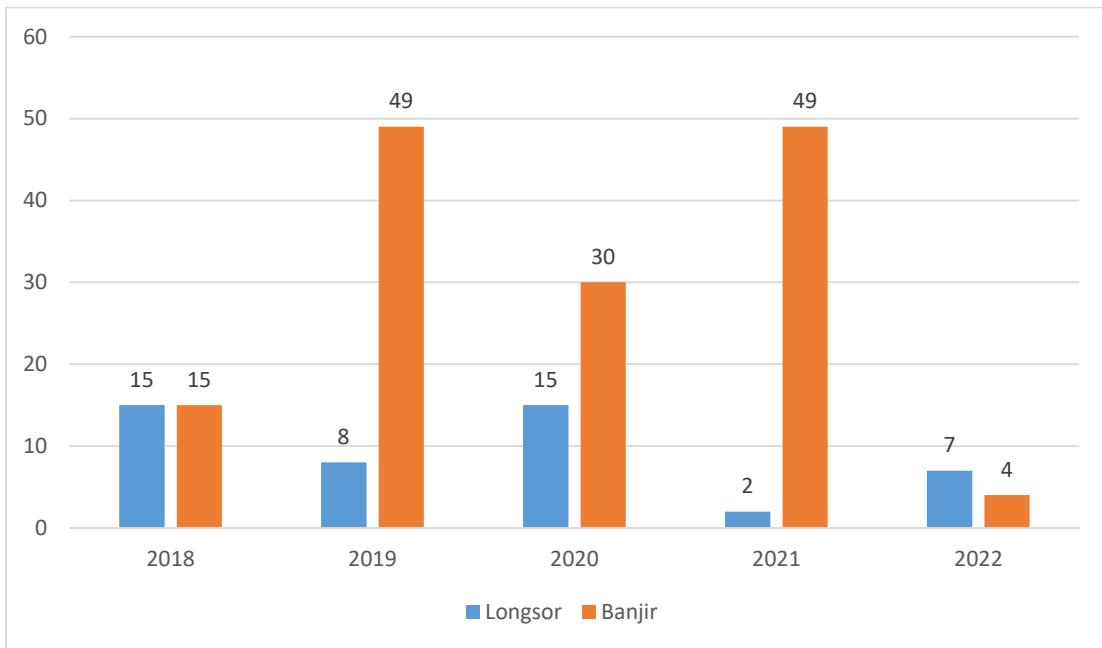
## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh sering terjadinya bencana tanah longsor di Kabupaten Ponorogo yang mengancam keamanan masyarakat Kabupaten Ponorogo. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk menangani dan mencegah bencana tanah longsor di Kabupaten Ponorogo. Namun, Kabupaten Ponorogo masih sangat rentan dengan bencana tanah longsor. Keadaan seperti ini mengganggu keselamatan masyarakat Kabupaten Ponorogo. Hal ini merupakan hal krusial untuk menjaga kenyamanan masyarakat Kabupaten Ponorogo. Sehingga, perlu adanya tindakan yang tepat untuk menangani permasalahan ini. Penelitian ini menggunakan indicator kolaborasi pemerintah yang digagas oleh Ansell dan Gash.(Ansell & Gash, 2008)

Sering terjadinya bencana tanah longsor di Ponorogo disebabkan oleh kondisi geografis di Kabupaten Ponorogo yang terdapat banyak dataran tinggi, yang dimana diujung bagian selatan dan timur Ponorogo dikelilingi oleh dataran tinggi dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter diatas permukaan laut sesuai yang dimuat dalam situs pemerintah resmi Kabupaten Ponorogo Serta curah hujan yang tinggi dan frekuensi terjadinya hujan yang cukup sering yang ditandai dengan seringnya banjir melanda Kabupaten Ponorogo. Bencana tanah longsor yang paling berdampak yang pernah terjadi di Ponorogo adalah bencana tanah longsor yang terjadi pada 1 April 2017 di Desa Banaran yang memakan korban jiwa tercatat 29 orang yang dinyatakan hilang tertimbun longsor, luka ringan 20 orang dan 30 rumah hancur. Melihat kemungkinan bencana yang besar, memerlukan langkah yang lebih besar juga, seperti kolaborasi antar stakeholder.

Gambar 1. 1 Data Bencana di Kabupaten Ponorogo

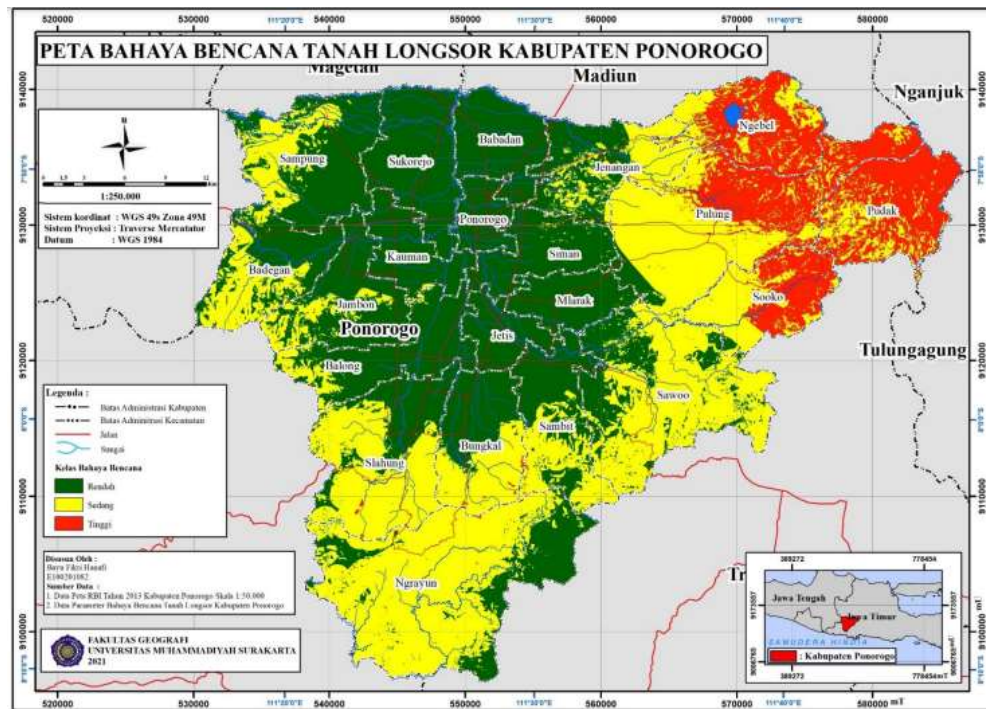


Sumber:

Badan Pusat Statistik (2022)

Data tersebut menunjukkan seberapa sering Kabupaten Ponorogo dilanda bencana tanah longsor dan banjir. Focus penelitian pada tanah longsor didasari, karena didasari dampak dari tanah longsor yang berbahaya. Di beberapa kasus tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Ponorogo memberi dampak pada tertutup akses jalan antar kota di Ponorogo dan kerugian pada rusaknya pertanian dan harta benda masyarakat. Kabupaten Ponorogo merupakan daerah yang berpotensi mengalami bencana tanah longsor karena bentuk morfologi Kabupaten Ponorogo yang bervariasi seperti dataran tinggi dan perbukitan. (Yuniarta et al., 2015) Bencana alam yang terjadi di Kecamatan Pulung sebagian wilayahnya tebing curam dan perbukitan.

Gambar 1. 2 Peta Kerawanan Bencana di Kabupaten Ponorogo



Sumber:

Bayu Fikri Hanafi (2022)

Persentase tingkat kerawanan longsor terbesar berada ditingkat kerawanan kelas rendah 5714,88 ha (36,49%), persentase sedang ditingkat kerawanan kelas tinggi 4792,25 ha (33,79%), persentase terkecil terdapat ditingkat kerawanan kelas sedang 3672,59 ha (25,90%). Bencana tanah longsor yang paling berdampak yang pernah terjadi di Ponorogo adalah bencana tanah longsor yang terjadi pada 1 April 2017 di Desa Banaran yang memakan korban jiwa tercatat 29 orang yang dinyatakan hilang tertimbun longsor, luka ringan 20 orang dan 30 rumah hancur. Kabupaten Ponorogo memiliki luas sebesar 1.371,78 km<sup>2</sup>. Data ini menunjukkan seberapa besar dampak yang diberikan oleh Bencana Tanah Longsor. Sehingga, diperlukan tindakan yang lebih baik untuk mencegah terjadinya bencana tanah longsor dan mengurangi dampaknya.

Manajemen bencana adalah upaya sistematis dan komprehensif untuk menanggulangi semua kejadian bencana secara cepat, tepat dan akurat untuk menekankan korban dan kerugian

yang ditimbulkan.(Danil, 2021. Ide kolaborasi pentahelix dalam manajemen bencana muncul dari keterbatasan pemerintah untuk mengagendakan manajemen bencana tanah longsor. Ditambah dengan longsor yang masih sering terjadi setiap tahunnya maka diperlukan penanganan yang baik untuk menekan jumlah korban dan kerugian. Kolaborasi pentahelix merupakan suatu kolaborasi atau kondisi saling berkoordinasi antara 5 komponen strategis penting yaitu pemerintah, dunia usaha, komunitas, akademisi, dan media massa pada setiap program kebencanaan. (Muhyi, 2017). Untuk mencapai tujuan tersebut dapat menggunakan kolaborasi pentahelix untuk mengefektifkan langkah pencegahan dan penanganan bencana tanah longsor.

Pemerintah juga memberi layanan penanganan bencana seperti BPBD pun sudah disiapkan dan juga fasilitasnya. Namun, Dengan luas begitu besarnya dan akses jalan yang baik masih belum merata membuat perlu adanya tindakan yang lebih untuk menekan jumlah kerugian dan korban jiwa. Namun, hal yang disiapkan pemerintah dirasa tidak cukup mengetahui masih banyak korban jiwa. Diperlukan partisipasi dari komunitas untuk mengurangi dampak bencana tanah longsor. Fokus pemerintah yang terpecah untuk menangani banyak hal membuat peran masyarakat dinilai perlu untuk menangani dan mengurangi resiko bencana tanah longsor.

BPBD juga membutuhkan bantuan dari komunitas untuk mempermudah manajemen bencana. Melihat banyaknya populasi di Kabupaten Ponorogo perlu adanya peran masyarakat dari komunitas maupun warga sipil untuk berkontribusi pada proses manajemen bencana. Penguatan masyarakat dan Komunitas membuat jalannya proses manajemen bencana lebih mudah apabila pemahaman mengenai proses manajemen bencana dapat sampai di masyarakat. Peran media juga penting dalam proses penanggulangan bencana agar masyarakat dapat memahami informasi mengenai manajemen bencana. Kontribusi akademisi juga bagian penting dalam manajemen bencana. Bencana yang terjadi pada satu daerah dengan daerah lain belum tentu memiliki cara

manajemen yang sama. Aspek seperti geografis, akses jalan, pemukiman menjadi pembeda dalam cara manajemen satu daerah dengan daerah lain. Akademisi diperlukan untuk meneliti mengenai bencana dan cara manajemen pada suatu daerah agar dapat cara manajemen yang tepat. Mengetahui keadaan tersebut, perlu adanya kolaborasi antar pihak untuk memaksimalkan dan mengefektifkan upaya pengurangan resiko bencana yang ada di Kabupaten Ponorogo.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana upaya kolaborasi pentahelix dalam upaya pengurangan resiko bencana dan Kabupaten Ponorogo setelah mengetahui bahwa Kabupaten Ponorogo rawan terdampak bencana karena aspek geologisnya yang merupakan datarung tinggi dan juga akses antar desa yang tidak cukup mudah diakses.

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan atas dasar ingin mengetahui kolaborasi pentahelix dalam pengurangan resiko bencana tanah longsor di Kabupaten Kabupaten Ponorogo.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian teoritis dapat membantu dalam pengembangan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep-konsep dasar dalam manajemen bencana. Ini termasuk pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi dampaknya, dan pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko dan mengelola bencana. Dan juga dapat digunakan untuk menyusun materi edukasi dan pelatihan yang lebih baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bencana dan bagaimana menghadapinya. Pengetahuan yang lebih baik dapat membantu masyarakat untuk mengambil tindakan yang lebih baik dalam menghadapi bencana.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini krusial karena akan berdampak pada banyak masyarakat untuk mengurangi dampak bencana tanah longsor, agar tidak mengorbankan banyak hal dan penelitian ini mempunyai banyak manfaat bagi kemajuan suatu bidang ilmu. Dengan dilakukannya penelitian ini, akan dapat ditemukannya banyak fakta baru mengenai upaya pengurangan resiko bencana yang dapat menambah referensi mengenai suatu topik, serta dapat menghasilkan inovasi baru yang mampu menyelesaikan masalah.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Kebutuhan akan pemahaman dan solusi untuk mengatasi bencana alam dan meminimalkan kerugian yang ditimbulkannya menjadi penting untuk diterapkan di Indonesia.(Nugroho et al., 2023) Mitigasi Bencana merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana, baik itu bencana alam, bencana ulah manusia maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat.(Arfani, 2022) Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia dan menciptakan budaya sadar bencana.(Pasaribu et al., 2023) Kebutuhan akan pemahaman dan solusi untuk mengatasi bencana alam dan meminimalkan kerugian yang ditimbulkannya menjadi penting untuk diterapkan di Indonesia.(Nugroho et al., 2023) Bagi yang pernah mengalami bencana, media edukasi dapat memperkuat pemahaman tentang pengalaman mereka selama kejadian tersebut. Bagi yang belum mengalami, media ini meningkatkan kesadaran akan tindakan yang harus diambil saat bencana terjadi.(Agustian et al., 2023)

Keterlibatan media sangat potensial untuk membantu meningkatkan kesadaran terhadap kesiapsiagaan bencana, saat tanggap darurat atau bencana, dan setelah bencana. Ini hadir dengan peningkatan teknologi dan akses ke informasi melalui berbagai platform.(Pasaribu et al., 2023)

Pada setiap program, semua pihak dalam ranah pentahelix (pemerintah, industri/bisnis, komunitas masyarakat, akademisi, dan media) memegang peranan penting dan signifikan.(Liyushiana, 2019) Komunikasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan koordinasi karena komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi (Haksama et al., 2023) Upaya pemulihan dilakukan oleh berbagai pihak dari pemerintah dan sektor swasta dengan revitalisasi langsung melalui berbagai program (Pratiwi & Chotimah, 2022).

Kesiapan masyarakat yang masih kurang dalam menghadapi bencana merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan resiko bencana menjadi besar.(Rahmawati, 2021) Dibuatnya kebijakan pengurangan risiko bencana bertujuan agar kegiatan pembangunan tidak meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana.(Alif & Alhadi, 2022) Untuk mengurangi korban saat bencana alam terjadi pemerintah dan pemerintah daerah serta badanyang bergerak dalam proses penanggulangan bencana alam harus memberikan pelatihan kepada masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan dan darurat bencana alam. (Dianty et al., 2022) Pengurangan risiko bencana (PRB) adalah kemampuan yang perlu dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat yang berada pada kawasan dengan risiko bencana tinggi agar mampu menghindari timbulnya kerugian akibat bencana.(Aji et al., 2021).

Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu dimana dalam penelitian ini membandingkan dua desa di Kabupaten Ponorogo yang menjadi korban bencana tanah longsor yang cukup parah di Kabupaten Ponorogo. Dalam dua lokasi penelitian terdapat cara yang berbeda dalam tujuan yang sama. Dimana terdapat satu desa yang cukup aktif dalam mengadakan pelatihan penanganan kebencanaan dan desa lainya menjadikan pencegahan bencana menjadi sumber pemasukan yang baru.

Pendekatan pentahelix adalah salah satunya pendekatan tata kelola kolaboratif sering digunakan dalam melihat kolaborasi dan sinergi antara lima aktor yang terdiri Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media dalam mencapainya tujuan bersama.(Bhaskara & Purwaningsih, 2023) Peran perguruan tinggi dalam kolaborasi pentahelix untuk penanggulangan bencana sangat dibutuhkan mengingat Indonesia merupakan wilayah rawan bencana.(Advenita & Elmada, 2023)

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	(Masyhuri et al., 2021)	Manajemen Dan Pengurangan Risiko Bencana Melalui Pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana)	Mengembangkan desa tangguh bencana (DESTANA) merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. DESTANA merupakan konsep untuk memastikan bahwa masyarakat siap menghadapi bencana. Konsep
2	(Berliandaldo et al., 2022)	Pengelolaan Geowisata Berkelanjutan Dalam Mendukung Pelestarian Warisan Geologi: Perspektif Collaborative	Peran dan relasi antar pemangku kepentingan merupakan yang amat dibutuhkan dan perlu ditunjang kelembagaan yang baik.
3	(Arfani, 2021)	Kolaborasi Pentahelix dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana pada Destinasi Wisata Di Desa Kalanganyar Sidoarjo	agar pariwisata memberikanKata Kunci: keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungannya maka Pentahelix; Desa perlu adanya interkoneksi sistem, subsistem, sektor, dan juga Wisata; Bencana dimensi sehingga tercipta orkestrasi yang terintegrasi secara optimal baik peran Bussiness, Government, Community, Academic, Dan Media (BGCAM) yang dikenal dengan Konsep Penta Helix. Tujuan
4	(Masyhuri, 2021)	Kolaborasi Antar StakeholdersDalam	Kolaborasi yang baik antar stakeholders akan berdampak pada



		Manajemen Bencana Tanah Longsor Di Kota Semarang	penanganan kebencanaan yang baik dan akan menekan dampak buruk yang akan ditimbulkan oleh bencana tanah longsor.
5	(Sumaryana, 2018)	Sosialisasi Model Dalam Manajemen Bencana Alama di Kabupaten Pangandaran	Sosialisasi dini kepada siswa sekolah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bencana dan menaikkan kemampuan masyarakat dalam penanganan bencana.
6	(Asmidin, 2022)	Kolaborasi Triple Helix Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Buton	Kebijakan penanggulangan dan tindakan bencana tanah longsor ini, kemudian ditransformasikan kepada masyarakat yang mengalami kerentanan sehingga relasi antara perguruan tinggi, perusahaan, dan pemerintah dalam bidang kebencanaan sangat dibutuhkan dalam upaya mitigasi bencana utamanya bencana tanah longsor.
7	(Agustina, 2017)	Penguatan Kesiapsiagaan Stakeholder dalam Pengurangan Risiko Bencana Alam Gempabumi	Kesiapsiagaan stakeholder yang terdiri dari komunitas pemerintah, masyarakat dan sekolah harus terus ditingkatkan sampai level sangat siap dalam menghadapi bencana alam gempabumi. Dengan demikian risiko bencana alam gempabumi seperti jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda dan gangguan psikologis akan dapat dikurangi dengan signifikan
8	(Utama et al., 2020)	Kapasitas Pemerintah Desa Dermaji Kabupaten Banyumas Dalam Pengurangan Risiko Bencana	Kapasitas pemerintah desa dituntut untuk mampu merepon kebutuhan publik salah satu sektor yakni kebencanaan. Dimana bencana merupakan kondisi peristiwa yang berada diluar kemampuan manusia yang menyebabkan kerugian jiwa maupun harta benda. Sehingga hal ini diperlukan sikap respon cepat dari stakeholders sebagai upaya kewajiban bersama salah satunya peran penting dari pemerintah desa.
9	(Hadi, 2021)	Pelatihan Dan Pendampingan Pembentukan	Masyarakat tangguh bencana digambarkan sebagai masyarakat yang memiliki pola pikir maju dan

		Forum Pengurangan Risiko Bencana Di Desa Pait, Kec. Kasambon, Kab. Malang	selalu mengutamakan pendekatan risiko bencana dalam setiap aktifitasnya. Sebenarnya risiko bencana dapat diminimalisir, apabila masyarakat memiliki kapasitas pengetahuan mengenai karakteristik dan ancaman dari bencana tersebut. Dalam konteks inilah, maka sangat dibutuhkan peran dan sinergi dari
10	(Nugroho et al., 2023)	Manajemen Dan Pengurangan Risiko Bencana Melalui Pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana)	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat juga merupakan bagian penting dari manajemen bencana, karena mereka dapat membantu masyarakat untuk memahami dan mengatasi dampak bencana.
11	(Agustian et al., 2023)	Kampanye Sadar Bencana Melalui Media Infografis Kebencanaan	Edukasi mengenai kesiapsiagaan dan pengetahuan terkait bencana merupakan bagian yang sangat penting dari manajemen bencana. Hal ini berlaku pada tahap pra-bencana, di mana pendekatan desain partisipatif digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai lokal kepada masyarakat,
12	(Alif & Alhadi, 2022)	Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Ancaman Bencana Tsunami Berbasis Masyarakat di Nagari Salido	Dibuatnya kebijakan pengurangan risiko bencana bertujuan agar kegiatan pembangunan tidak meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana. Keberhasilan pihak-pihak luar dalam memfasilitasi masyarakat guna mewujudkan kesiapsiagaan merupakan sebuah keberhasilan masyarakat juga, diharapkan masyarakat akan memiliki seluruh proses peningkatan kesiapsiagaan itu sendiri setelah difasilitasi oleh pihak luar. Pada
13	(Dianty et al., 2022)	Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menyediakan Dana Penanggulangan Bencana Alam Menurut Undang-	Bencana alam itu sendiri memang tidak dapat dicegah, namun dampak buruk akibat bencana dapat kita cegah dengan kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi.

		Undang No. 24 Tahun 2007	
14	(Aji et al., 2021),	Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana Multi-hazard Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Guna Mendukung Keamanan Nasional	Kapasitas pengurangan risiko bencana (PRB) adalah kemampuan yang perlu dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat yang berada pada kawasan dengan risiko bencana tinggi agar mampu menghindari timbulnya kerugian akibat bencana. Berdasarkan
15	(Bhaskara & Purwaningsih, 2023)	Pentahelix Approach in The Implementation of Disaster Resilient Village (Destana) Sumber Village Magelang Regency	Lima aktor dalam konsep Pentahelix, yaitu akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media, memiliki peran masing-masing dalam mengimplementasikan program. Pemerintah, masyarakat, dan akademisi merupakan aktor yang memiliki peran signifikan dalam pelaksanaan Destana. Sektor
16	(Banjarnahor et al., 2020)	Implementasi Sinergitas Lembaga Pemerintah Untuk Mendukung Budaya Sadar Bencana di Kota Balikpapan	Salah satu caranya adalah dengan menumbuhkan budaya sadar bencana di masyarakat agar masyarakat dapat secara aktif dan mandiri melakukan upaya penyelamatan ketika bencana berlangsung
17	(Rahma, 2018)	Implementasi Program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Melalui Pendidikan Formal	Pengetahuan dasar dari pendidikan pengurangan risiko bencana adalah bagian penting dari usaha untuk meningkatkan ketahanan anak terhadap bencana. Anak nantinya akan menjadi agen peubah yang dapat mengajari masyarakatnya agar terbentuk budaya siap siaga menghadapi bencana.
18	(Ulum, 2018)	Manajemen Bencana Suatu Pengantar Pendekatan Proaktif	Mobilisasi dan distribusi sumber daya berupa orang, peralatan, dan material harus direncanakan agar dapat memberikan kontribusi dalam upaya pengurangan resiko bencana. Selain

19	(Pasaribu et al., 2023)	Kolaborasi Pentahelix Dalam Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi	Peran pemerintah dibutuhkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, promosi, perizinan, alokasi keuangan, kebijakan inovasi publik, dan membangun jaringan dengan mitra swasta maupun masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah berperan mengkoordinasi para unsur atau pemangku kepentingan lainnya supaya berkontribusi dalam pengembangan kolaborasi ini.
20	(Liyushiana, 2019)	Pasca Bencana Erupsi Gunung Api Sinabung Di Kabupaten Karo, Sumatera Utara	Pada setiap program, semua pihak dalam ranah pentahelix (pemerintah, industri/bisnis, komunitas masyarakat, akademisi, dan media) memegang peranan penting dan signifikan.
21	(Haksama et al., 2023)	Peningkatan Peran Kolaborasi Pentahelix Dalam Upaya Kesiapsiagaan Mengenai Bencana Multihazard Di Kabupaten Banyuwangi	Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan upaya kesiapsiagaan adalah dengan adanya kolaborasi antar seluruh sektor-sektor yang berhubungan, salah satu yang dapat diterapkan yaitu dengan kolaborasi pentahelix bencana.
22	(Pratiwi & Chotimah, 2022)	Pemulihan Pasca Bencana Erupsi di Kawasan Wisata Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Model Pentahelix	Kolaborasi dalam pemulihan bencana dapat memperbaiki keadaan kembali ke semula lebih cepat. Sehingga, masyarakat dapat segear melaksanakan kegiatan kembali dan mengembalikan kondisi masyarakat.
23	(Mulyana & Azis, 2021)	Analisis Kinerja Pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat	Gambaran dari kinerja organisasi dapat dikatakan efisien atau tidak, dapat dilihat dari pencapaian organisasi tersebut. Semakin banyak program dari organisasi yang tercapai secara optimal dengan hasil maksimal maka semakin baik pula kinerja dari organisasi tersebut. Dalam merealisasikan suatu

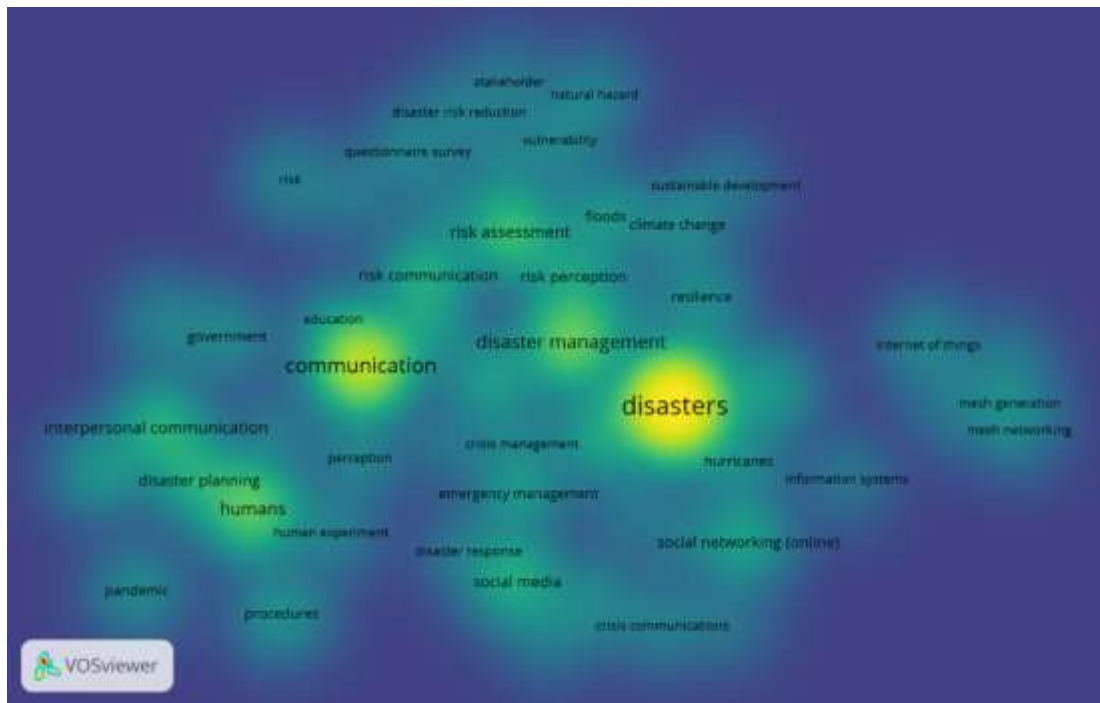
			program tentunya diperlukan suatu proses penilaian. Proses
24	(Rahmawati, 2021)	Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat Tahun 2021 Pengabdian Masyarakat Pembentukan Dan Penguatan Tim Siaga Bencana Desa Desa Kebonrejo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri	Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana merupakan salah satu hal yang sangat penting, dengan melakukan pemberdayaan yang tepat kepada masyarakat dapat meningkatkan kapasitas organisasi pemerintah dan lembaga. Menjadi
25	(Advenita & Elmada, 2023)	Intervensi Perguruan Tinggi pada Pengurangan Risiko Bencana Lewat Proyek Kemanusiaan	Pengurangan risiko bencana menjadi upaya yang perlu terus-menerus dilakukan dan diupayakan oleh seluruh elemen masyarakat. Perguruan
26	(Adlika et al., 2023)	Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Tingkat Sekolah Dasar	Sosialisasi pengurangan risiko bencana merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya bencana dan cara menghadapinya.
27	(Fitrianto, 2020)	Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi pada BPBD Kabupaten Kediri)	Peningkatan kapasitas SDM dalam kebijakan penanggulangan bencana baik dalam hal kuantitas maupun kuantitas. Perlu
28	(Nugroho, 2018)	Manajemen Bencana di Indonesia.	Caranya adalah dengan meningkatkan kapasitas masyarakat agar lebih siap dalam menghadapi bencana, mengingat resiko bencana dihitung dengan cara mengalikan Bahaya, Kepadatan, serta Kerentanan Masyarakat, kemudian membaginya dengan Kapasitas yang dimiliki masyarakat.

29	(Nandi & Marlyono, 2018)	The Preparedness Level of Community in Facing Disaster in West Java Province	menyatakan bahwa kesiapsiagaan sangat sulit untuk dibentuk dan dibudayakan kepada semua orang, rata-rata kesiapsiagaan masyarakat masih rendah.
30	(Addiarto & Yunita, 2019)	Upaya Mewujudkan Kampus Siaga Bencana Melalui Peningkatan Kesiapsiagaan Mahasiswa Keperawatan Dengan Penerapan Metode Tabletop Disaster Exercise (Tde)	Kesiapsiagaan yang dipupuk dan ditingkatkan akan senantiasa memberikan dampak juga bagi institusi yaitu terwujudnya budaya peka bencana

Sumber: Diolah oleh penulis (2023)

Dari table di atas telah ditemukan terdapat 3 klasifikasi tema dari penelitian. 3 klasifikasi tersebut yaitu Pelaksanakan peran masing-masing aktor, Persiapan kebijakan dan sarana, dan Program manajemen bencana. Namun, dari ketiga klasifikasi belum ada yang menambahkan aspek media massa sebagai aktor dalam kebencanaan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada kolaborasi pentahelix pada pengurangan resiko bencana.

Gambar 2. 1 Hasil Dari VosViewer



Kekuatan hubungan, seperti dapat menunjukkan jumlah referensi yang dikutip yang dimiliki oleh dua publikasi yang sama (dalam kasus hubungan penggantungan bibliografi), jumlah publikasi yang ditulis bersama oleh dua peneliti (dalam kasus hubungan penulisan bersama), atau jumlah publikasi di mana dua istilah muncul bersamaan (dalam kasus hubungan kebersamaan).(Effendi, 2021)

## **F. Kerangka Teori**

### **A. Kolaborasi Pentahelix**

#### **a.) Definisi Kolaborasi Pentahelix**

Dalam hal ini model pentahelix berfokus pada 5 unsur yang menjadi penunjang dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata diantaranya pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akademisi sebagai transfer pengetahuan dan penelitian terkait, masyarakat atau komunitas sebagai kekuatan sosial, pengusaha sebagai kekuatan dalam mekanisme pasar serta media sebagai alat

promosi objek wisata tersebut.(Kagungan et al., 2021) Kolaborasi pentahelix bencana merupakan suatu kolaborasi atau kondisi saling berkoordinasi antara 5 komponen strategis penting yaitu pemerintah, dunia usaha, komunitas, akademisi, dan media massa pada setiap program kebencanaan. (Muhyi, 2017). Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan upaya kesiapsiagaan adalah dengan adanya kolaborasi antar seluruh sektor-sektor yang berhubungan, salah satu yang dapat diterapkan yaitu dengan kolaborasi pentahelix bencana.(Kagungan et al., 2021) Definisi dari kolaborasi pemerintah dapat menentukan peran masing-masing dan keberhasilan kolaborasi pentahelix dalam menjalankannya.

#### **b.) Tujuan Kolaborasi Pentahelix**

Dengan melakukan kolaborasi pentahelix, masyarakat memperoleh bantuan pengetahuan tentang kebencanaan dan cara cara mengurangi risiko bencana yang terjadisehingga masyarakat mempunyai gambaran preventif tentang bencana.(Arfani, 2022) kolaborasi adalah hubungan antar organisasi yang saling berpartisipasi dan saling menyetujui untuk bersama mencapai tujuan, berbagi informasi, berbagi sumberdaya, berbagi manfaat, dan bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan berbagai masalah.(Prihantini et al., 2020) Tujuan dari kolaborasi pemerintahan menentukan tingkat keefektifan kolaborasi pemetintahan, karena berhubungan dengan bagaimana upaya antar aktor dalam menangani sebuah bencana.

#### **c.) Indikator Kolabroasi Pentahelix**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Ansell dan Gash (2010), proses kolaborasi terdapat komponen-komponen yang mempengaruhi satu sama lain yaitu dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Forum diprakarsai oleh badan atau lembaga publik.



Serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung Pemangku kepentingan “non-state” di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau aset.

(2) Peserta forum mencakup aktor non-negara.

keberlanjutan hubungan interaksi antar anggota karena dilatarbelakangi kebutuhan pertukaran sumber daya dan negosiasi untuk membagi bersama.

(3) Peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dan keputusan tidak harus merujuk kepada aktor-aktor publik. Pemerintah melibatkan media, akademisi, swasta, dan komunitas dalam upaya pengurangan resiko bencana secara langsung dan tidak menjadikan aktor non-pemerintah dalam pengambilan keputusan dan keputusan tidak diambil sepihak dari aktor publik saja.

(4) Forum diselenggarakan secara formal dan bertemu secara kolektif.

Penyelenggaraan secara formal dan bertemu secara kolektif diperlukan untuk menjamin keseriusan seluruh aktor pentahelix dalam upaya pengurangan resiko bencana dan pertemuan secara kolektif diperlukan untuk menjamin keterlibatan semua pihak serta menjamin kesetaraan suara dalam diskusi.

(5) forum bertujuan untuk mengambil keputusan melalui konsensus.

Keputusan yang diambil merupakan persetujuan bersama dari pertimbangan pemerintah, media, akademisi, swasta, dan komunitas.

(6) fokus kolaborasi adalah pada kebijakan publik atau manajemen publik.

Suatu pengaturan yang mengatur dimana satu atau lebih lembaga publik berhubungan langsung dengan lembaga non-negara pemangku kepentingan dalam musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik yang berdasarkan pengelolaan dan penanganan masalah untuk ditaati masyarakat agar ditaati masyarakat.

#### **d.) Perkembangan Model Kolaborasi Pentahelix**

Awal mula ide model kolaborasi dari gagasan (ETZKOWITZ & LEYDESDORFF, 1995) menyatakan bahwa sebuah model triple helix hubungan akademis, industry, pemerintah berasal dari ketiga sektor tersebut, peserta lokakarya ini merupakan peserta dalam penciptaan lingkungan inovasi baru. Lalu, setelah beberapa tahun kemudian, muncul gagasan baru dalam model kolaborasi pemerintahan yang berakar dari paham triplehelix. Ide baru mengenai konsep quadruplehelix digagas oleh (Carayannis & Campbell, 2009) menjelaskan konsep quadruplehelix dengan menambahkan unsur masyarakat dari konsep triplehelix sebagai salah satu komponen dari sebuah kolaborasi pemerintahan. Setelah itu, muncul gagasan pentahelix yang dikemukakan oleh Riyanto pada tahun 2018 dengan menambahkan media sebagai salah satu aktor kolaborasi pemerintah.

#### **e.) Komponen Kolaborasi Pemerintahan**

Lima (5) komponen utama dalam kolaborasi menurut (Lestari & Maliki, 2001);

- 1) Collaborative Culture. Seperangkat nilai-nilai dasar yang membentuk tingkah laku dan sikap bisnis. Di sini yang dimaksudkan adalah budaya dari orang-orang yang akan berkolaborasi. Ini budaya menggabungkan bahasa yang sama dan cara yang diharapkan untuk bekerja dengannya lain. (Sanchez, 2012) Menciptakan budaya kolaboratif yang sesungguhnya memerlukan upaya kelompok oleh semua anggota, budaya. Selain itu, budaya kolaboratif memerlukan upaya berkelanjutan untuk pemeliharaannya. (Edmonson et al., 2001) Peran budaya kolaboratif tidak

hanya berhenti pada berbagi pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kreativitas dan inovasi organisasi.(Mangasuli & Kaluti, 2023)

- 2) Collaborative Leadership. Suatu kebersamaan yang merupakan fungsi situasional dan bukan sekedar hirarki dari setiap posisi yang melibatkan setiap orang dalam organisasi. Dengan semua kekhawatiran dan tanggung jawab yang ada di pundak pemimpin, diperlukan perubahan dalam pendekatan kepemimpinan yang dapat memanfaatkan pengetahuan, pengalaman, dan keahlian yang luas dari seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong keterlibatan yang inovatif, menciptakan kemitraan yang efektif, dan memposisikan organisasi mereka secara kompetitif untuk mencapai kesuksesan. (Ang'ana & Chiroma, 2021) Kepemimpinan yang memiliki tujuan dapat mengatasi kelambanan bertindak dan mendorong kolaborasi yang sukses dengan menciptakan visi yang menarik, memungkinkan komunikasi yang efektif, dan membangun kepercayaan di antara peserta. (Calvert, 2018)
- 3) Strategic Vision. Prinsip-prinsip pemandu dan tujuan keseluruhan dari organisasi yang bertumpu pada pelajaran yang berdasarkan kerjasama intern dan terfokus secara strategis pada kekhasan dan peran nilai tambah di pasar. Visi Strategis mewakili Refleksi organisasi mengenai kebutuhan dan prioritasnya, berdasarkan penilaian lanskap apa yang akan terjadi pada dekade berikutnya.(Barrie, 2007) Visi Strategis merupakan naskah geopolitik yang mencari jawaban apakah prinsip unus inter pares (satu di antara yang sederajat) atau primus inter pares (yang pertama di antara yang sederajat) akan berlaku dalam tatanan dunia baru yang sedang berkembang.(Dezső Szenkovics, 2016) Pernyataan visi adalah peta jalan perusahaan, yang menunjukkan apa yang diinginkan perusahaan dan memandu inisiatif transformasional dengan menetapkan arah yang pasti untuk pertumbuhan perusahaan. (Y & M. P, 2020)

- 4) Collaborative Team Process. Sekumpulan proses kerja non birokrasi yang dikelola oleh tim-tim kolaborasi dari kerjasama profesional yang bertanggung jawab penuh bagi keberhasilannya dan mempelajari keterampilan-keterampilan yang memungkinkan mereka menjadi mandiri. Proses tim melibatkan tindakan anggota tim, sedangkan keadaan darurat adalah keadaan kognitif, motivasi, atau afektif yang muncul dari interaksi antar anggota tim.(Driskell et al., 2018)
- 5) Collaborative Structure. Pembentukan diri dari sistem-sistem pendukung bisnis (terutama sistem informasi dan sumberdaya manusia) guna memastikan keberhasilan tempat kerja yang kolaboratif. Para anggotanya merupakan kelompok intern yang melihat organisasi sebagai pelanggan dan terfokus pada kualitas di segala aspek kerjanya. interaksi antara anggota yang berbeda dalam rangkaian diskusi, dalam sebuah proses yang secara progresif menghasilkan rincian relevan yang digunakan untuk menafsirkan permasalahan dan menyarankan solusi.(Kudaravalli & Faraj, 2008) Struktur organisasi menentukan bagaimana kekuasaan, peran, dan tugas dapat didefinisikan, dikendalikan, dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan masyarakat. Hal ini juga menentukan cara di mana pengetahuan, informasi atau data mengalir di berbagai lapisan organisasi.(García-Pérez, 2016)

## **B. Manajemen Bencana**

### **a.) Pengertian Manajemen Bencana**

Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. (UU 24/2007). Manajemen bencana menurut Nurjanah (2012:42) sebagai Proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen bencana seperti planning, organizing,

actuating, dan controlling. Cara kerjanya meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan. Manajemen bencana atau seringkali disebut juga sebagai penanggulangan bencana merupakan suatu bentuk rangkaian kegiatan yang dinamis, terpadu dan berkelanjutan yang dilaksanakan semenjak sebelum kejadian bencana, pada saat atau sesaat setelah kejadian bencana, hingga pasca kejadian bencana. (Hubeis & Najib, 2014) Manajemen bencana adalah upaya sistematis dan komprehensif untuk menanggulangi semua kejadian bencana secara cepaat, tepat dan akurat untuk menekankan korban dan kerugian yang ditimbulkan. (Danil, 2021) Manajemen Bencana: serangkaian upaya komprehensif dalam pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Kegiatan dalam pra bencana ditujukan untuk mengurangi risiko bencana, bersifat preventif seperti: Pencegahan dan Mitigasi atau penjinakan sedangkan dalam Kesiapsiagaan meliputi peringatan dini dan perencanaan saat bencana (tanggap darurat) yakni: Pengkajian darurat Rencana operasi, Tanggap darurat dan Setelah bencana, Rehabilitasi dan Rekonstruksi. (Safri, 2016) Penyusunan langkah sistematis dalam manajemen bencana akan berdampak pada keberhasilan program dalam upaya pengurangan resiko bencana.

### **b.) Manfaat Manajemen Bencana**

Tujuan manajemen bencana secara seder-hana tentu saja meminimalisir jatuhnya korban jiwa dan hartabenda. (Alhadi, 2014) Manajemen bencana diperuntukkan mempersiapkan diri menghadapi semua bencana atau kejadian yang tidak diinginkan, menekankan kerugian dan korban yang dapat timbul akibat dampak suatu bencana dan kejadian, meningkatkan kesadaran semua pihak dalam masyarakat atau organisasi tentang bencana. Diperlukan sistem manajemen bencana yang bertujuan untuk:

- a. Mempersiapkan diri menghadapi semua bencana atau kejadian yang tidak diinginkan
- b. Menekankan kerugian dan korban yang dapat timbul akibat dampak suatu bencana dan kejadian

c. Meningkatkan kesadaran semua pihak dalam masyarakat atau organisasi tentang bencana sehingga terlibat dalam proses penanganan bencana.

d. Melindungi anggota masyarakat dari bahaya atau dampak bencana sehingga korban dan penderitaan yang dialami dapat dikurangi.

(Danil, 2021)

### **c.) Siklus Manajemen Bencana**

Siklus Manajemen Bencana Manajemen bencana meliputi tahap - tahap sebagai berikut :

1. Sebelum bencana terjadi, meliputi langkah – langkah pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan kewaspadaan.

2. Pada waktu bencana sedang atau masih terjadi, meliputi langkah – langkah peringatan dini, penyelamatan, pengungsian dan pencarian korban.

3. Sesudah terjadinya bencana, meliputi langkah penyantunan dan pelayanan, konsolidasi, rehabilitasi, pelayanan lanjut, penyembuhan, rekonstruksi dan pemukiman kembali penduduk.

(Danil, 2021) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, manajemen bencana terdiri dari tujuh unsur:

#### **a. Pencegahan**

Pencegahan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman bencana.

#### **b. Kesiapsiagaan**

Kesiapsiagaan merupakan rangkaian kegiatan antisipasi bencana melalui pengorganisasian langkah yang tepat dan berdaya guna.

### c. Peringatan Dini

Peringatan dini merupakan rangkaian kegiatan pemberian peringatan kepada masyarakat sesegera mungkin mengenai kemungkinan terjadinya bencana oleh lembaga berwenang.

### d. Mitigasi

Mitigasi merupakan rangkaian upaya pengurangan risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

### e. Tanggap Darurat Bencana

Tanggap darurat bencana merupakan rangkaian kegiatan pada saat kejadian bencana sesegera mungkin untuk menangani dampak buruk yang timbul akibat kejadian bencana tersebut. Tanggap darurat bencana meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan penyelamatan, serta pengkondisian prasarana dan sarana.

### f. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan pemulihan dan perbaikan aspek pelayanan publik agar memadai wilayah pascabencana.

### g. Rekonstruksi

Rekonstruksi merupakan pembangunan kembali sarana prasarana dan kelembagaan agar kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya pada wilayah pascabencana dapat tumbuh dan berkembang. (Kumalasari, 2014).

## G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah suatu definisi yang dijabarkan secara konsep (teori) dari masing-masing variabel yang telah di kemukakan oleh para ahli atau pakar. (Jamaludin, 2018)

### 1. Kolaborasi Pentahelix

Kolaborasi merupakan bentuk kerjasama berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama dalam upaya menyelesaikan masalah dengan cara yang efektif. Kolaborasi mempunyai makna menjalankan tugas masing-masing aktor sesuai peran yang dijalankan dalam penyelesaian masalah dengan tujuan yang sama, sudut pandang yang sama, keinginan untuk memberi manfaat dan kebaikan bagi masyarakat luas.

### 2. Manajemen Bencana

Manajemen Bencana merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mengontrol dampak dari sebuah bencana dan keadaan darurat, serta memberi memberikan program dan langkah-langkah yang akan berguna untuk masyarakat dalam menyelamatkan masyarakat dan mengurangi jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya sebuah bencana.

## H. Definisi Operasional

VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER
Kolaborasi pentahelix dalam PRB Tanah Longsor	Diprakarsai oleh badan atau lembaga publik.	Upaya pemerintah dalam mengadakan kolaborasi dalam usaha Pengurangan Resiko Bencana.
	Mencakup aktor non-negara.	Keterlibatan peran dari organisasi, masyarakat, swasta, media dalam melaksanakan program Pengurangan Resiko Bencana
	Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan.	Koordinasi antar aktor dalam menjalankan kolaborasi dalam upaya Pengurangan Resiko Bencana.



	Diselenggarakan secara formal dan bertemu secara kolektif.	Adanya pertemuan antar aktor dalam mendiskusikan permasalahan Pengurangan Resiko Bencana.
	Forum bertujuan untuk mengambil keputusan melalui consensus.	Menentukan program yang dapat dijalankan oleh masing-masing peran dalam menjalankan Pengurangan Resiko Bencana.
	Fokus kolaborasi adalah pada kebijakan publik.	Menghasilkan program Pengurangan Resiko Bencana maupun kebijakan yang disetujui oleh masing-masing aktor.

Tabel 2. 2 Indikator Kolaborasi Pemerintahan

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. (Murdiyanto, 2020) Metode kualitatif digunakan karena hasil yang akan didapat sebagai penelitian akan lebih akurat karena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Permasalahan kebencanaan merupakan permasalahan yang memberi dampak serius kepada masyarakat luas. Penelitian ini berfokus pada program kolaborasi pemerintahan dalam menyelesaikan permasalahan bencana yang dimana setiap masing-masing aktor mempunyai pengalaman dan peran berbeda dalam mengatasi isu yang sedang diselesaikan dan dibutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan. Pendekatan kualitatif menjadi jawaban tepat dalam memahami permasalahan yang terjadi. Karena, dapat memberi kesempatan untuk menggali lebih dalam dan memberi jawaban yang akurat dengan apa yang terjadi di lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### a.) Data Primer

Data primer adalah data informasi yang diperoleh tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya.(Edi, 2016) Penggunaan jenis data primer ditujukan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Tabel 2. 3 Indikator Kolaborasi Pentahelix

No.	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Program yang dibentuk dalam upaya Pengurangan Resiko Bencana berbasis kolaborasi pentahelix.	1) Kepala BPBD Kabupaten Ponorogo 2) Kepala Desa Tugurejo dan Banaran 3) Ketua Komunitas (Taruna Siaga Bencana & Perempuan Tangguh Bencana) Desa Tugurejo & (Destana) Desa Banaran 4) Radio Gema Surya 5) Dosen Universitas Darussalam Ponorogo	Wawancara
2.	Inisiasi upaya kolaborasi pentahelix dalam Pengurangan Resiko Bencana.	1) Kepala Desa Tugurejo 2) Kepala Desa Banaran	Wawancara
3.	Partisipasi masing-masing aktor dalam menjalankan program Pengurangan Resiko Bencana	1) Kepala BPBD Kabupaten Ponorogo 2) Kepala Desa Tugurejo dan Banaran 3) Ketua Komunitas (Taruna Siaga Bencana & Perempuan Tangguh Bencana) Desa Tugurejo & (Destana) Desa Banaran 4) Radio Gema Surya 5) Dosen Universitas Darussalam Ponorogo	Wawancara

4.	Pemahaman resiko bahaya dan kerentanan Bencana Tanah Longsor.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepala BPBD Kabupaten Ponorogo</li> <li>2) Kepala Desa Tugurejo dan Banaran</li> <li>3) Ketua Komunitas (Taruna Siaga Bencana &amp; Perempuan Tangguh Bencana) Desa Tugurejo &amp; (Destana) Desa Banaran</li> <li>4) Radio Gema Surya</li> <li>5) Dosen Universitas Darussalam.</li> </ol>	Wawancara
5.	Kebijakan Mempertimbangkan resiko bencana tanah longsor.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepala BPBD Kab. Ponorogo</li> <li>2) Kepala Desa Tugurejo dan Banaran</li> <li>3) Ketua Komunitas (Taruna Siaga Bencana &amp; Perempuan Tangguh Bencana) Desa Tugurejo &amp; (Destana) Desa Banaran</li> </ol>	Wawancara
6.	Keputusan dan tindakan respon yang baik selama dan setelah terjadi bencana Tanah Longsor.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepala BPBD Kabupaten Ponorogo</li> <li>2) Kepala Desa Tugurejo dan Banaran</li> <li>3) Ketua Komunitas (Taruna Siaga Bencana &amp; Perempuan Tangguh Bencana) Desa Tugurejo &amp; (Destana) Desa Banaran</li> <li>4) Radio Gema Surya</li> <li>5) Dosen Universitas Darussalam Ponorogo</li> </ol>	Wawancara

7.	Rencana jangka panjang melalui tindakan mengurangi resiko bencana Tanah Longsor.	1) Kepala BPBD Kab. Ponorogo 2) Kepala Desa Tugurejo dan Banaran 3) Ketua Komunitas (Taruna Siaga Bencana & Perempuan Tangguh Bencana) Desa Tugurejo & (Destana) Desa Banaran	Wawancara
----	--	---	-----------

Sumber: Data diolah penulis(2023)

Tabel 2. 4 Narasumber Yang Diwawancara

No.	Narasumber	Jumlah Narasumber
1.	Kepala BPBD Kabupaten Ponorogo	1
2.	Kepala Desa Tugurejo	1
3.	Kepala Desa Banaran	1
4.	Ketua Taruna Siaga Bencana Desa Tugurejo	1
5.	Ketua Destana Banaran	1
6.	Ketua Perempuan Tangguh Bencana Desa Tugurejo	1
7.	Ketua Karang Taruna Desa Banaran	1
8.	Media massa Radio Gema Surya	1
9.	Penanggung Jawab Yatim Mandiri Ponorogo	1
10.	Dosen Universitas Darussalam Ponorogo	1
<b>Total</b>		<b>10</b>

Sumber: Diolah oleh Penulis (2023)

#### b.) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian.(Edi, 2016) Data sekunder memiliki keunggulan data yang dapat dengan mudah diakses melalui jejaring internet.

Tabel 2. 5 Data Sekunder

No.	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Data Kejadian Bencana	BPBD Kabupaten Ponorogo	Dokumentasi
2.	Peraturan Desa	Pemerintahan Desa	Dokumentasi
3.	Sarana dan Prasarana	Pemerintahan Desa	Dokumentasi
4.	Peta Desa	Pemerintahan Desa	Dokumentasi
5.	Monografi Desa	Pemerintahan Desa	Dokumentasi

Sumber: Data Diolah Penulis (2023)

Tabel 2. 6 Dokumen Penelitian

No.	Nama Dokumen
1.	Data Kejadian Bencana Desa Tugurejo
2.	Data Kejadian Bencana Desa Banaran
3.	Peta Desa Tugurejo
4.	Peta Desa Banaran

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses melakukan penelitian, diperlukan adanya kumpulan data untuk menjadi bahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. (Mudjia Rahardjo, 2010) Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. (Mudjia Rahardjo, 2010)

### **a.) Wawancara**

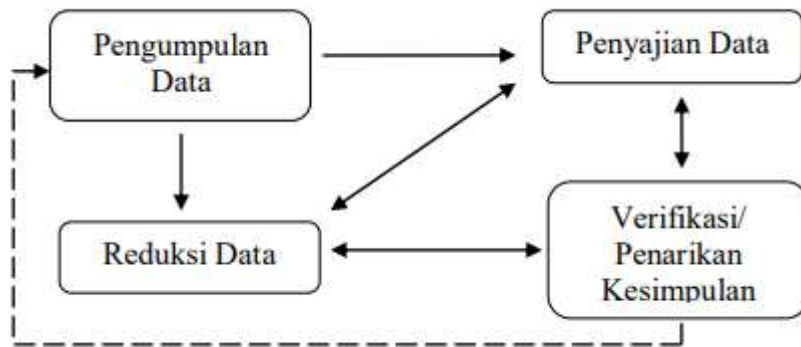
Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan ini. Teknik wawancara sebagai teknik pengumpulan data dipilih karena wawancara mampu menggali lebih dalam isu dan jawaban yang sedang dikaji. Pada pengumpulan data wawancara, peneliti menentukan beberapa narasumber yang akan berkaitan dengan pihak terkait, seperti BPBD Kabupaten Ponorogo, Pemilik media massa Radio Gema Surya, ketua Taruna Tangguh Bencana Desa Tugurejo, Ketua Perempuan Tangguh Bencana Desa Tugurejo, Kepala Desa Banaran. Wawancara memberi kesempatan kita untuk memberi pertanyaan yang lebih dalam. Dengan kemampuannya menggali lebih dalam dapat membantu kita mendapat jawaban yang spesifik terhadap permasalahan yang diteliti.

### **b.) Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui buku-buku, jurnal, arsip yang relevan dengan masalah penelitian maupun hasil penelitian yang pernah dilakukan. Dokumen yang akan dijadikan dokumentasi diambil dari jurnal yang terdapat di dunia maya maupun dokumen yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi diimplementasikan untuk menguatkan hasil jawaban dari wawancara.

## **3. Teknik Analisis Data**

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.



Dilakukanya analisis data dengan cara ini untuk mendapat hasil olahan data untuk penelitian yang tepat menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Data yang telah didapat dari hasil wawancara dan observasi akan direduksi dengan cara disortir untuk mendapat data yang spesifik. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Setelah itu, data yang telah disortir dan disusun untuk disajikan untuk menampilkan hasil pengumpulan data yang lebih ringkas. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Lalu, data yang telah disusun tersebut di ambil kesimpulan untuk mendapatkan hasil penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.